

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan dalam laporan keuangan pemerintah terus meningkat, bersamaan dengan kemajuan perkembangan teknologi dan media sosial yang dapat memudahkan akses publik terhadap informasi yang didapat. Publik kini lebih sadar akan hak mereka untuk mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan dan mengelola dana publik, termasuk di dalamnya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Transparansi laporan keuangan pemerintah dinilai penting untuk mewujudkan akuntabilitas, menghindari korupsi, serta memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kasus-kasus penyalahgunaan anggaran, baik di tingkat nasional maupun daerah, mendorong masyarakat untuk semakin vokal dalam menuntut adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, adanya dorongan dari lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah, seperti Transparansi International, telah memperkuat desakan agar pemerintah memberikan laporan keuangan yang jelas, tepat waktu, dan mudah diakses.

Meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan transparansi, masyarakat masih menginginkan proses yang lebih terbuka dan partisipasi terutama dalam penyusunan anggaran, pengelolaan belanja, dan pelaporan hasil keuangan pemerintah. Selain itu juga masyarakat menginginkan informasi yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan keuangan daerah tersebut (Suwardi, 2019).

Ketika aksesibilitas dan transparansi laporan keuangan ditingkatkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah juga akan bertambah (Suwardi, 2019). Keterbukaan laporan keuangan pemerintah daerah mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Keterbukaan yang diminta oleh

masyarakat semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan akses informasi yang lebih luas. (Zubaedah et al., 2020) mengungkapkan bahwa transparansi yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik dan berdampak negatif pada reputasi pemerintah.

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dan penyajian laporan keuangan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menjadi tolak ukur integritas serta efisiensi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipahami oleh masyarakat luas.

Mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan harus merupakan representasi terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas yang memberikan informasi berguna bagi para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. PSAK No. 1 juga menekankan pentingnya *fair presentation*, di mana informasi yang disajikan harus jujur, lengkap, dan bebas dari kesalahan material. Dalam konteks sektor publik, hal ini sangat relevan karena laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi tidak hanya untuk kepentingan internal, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat atas pengelolaan dana publik.

Menurut (Mardiasmo, 2018) akuntansi sektor publik harus mampu menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah, menilai kepatuhan terhadap anggaran, dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara bertanggung jawab. Dengan mengikuti standar akuntansi seperti PSAK dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan dapat menjadi instrumen yang

objektif dalam mengukur sejauh mana pemerintah menjalankan amanah publik secara efisien dan jujur. Langkah ini sangat penting untuk memastikan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah (Susetyo, 2023).

Oleh karena itu, tidak hanya dari sisi teknis penyusunan laporan keuangan yang harus diperhatikan, tetapi juga bagaimana laporan tersebut dapat diakses (aksesibilitas) dan diawasi melalui sistem pengendalian internal yang kuat. Ketiganya penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan pengendalian internal berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap transparansi kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketika standar akuntansi diimplementasikan secara konsisten dan disertai dengan sistem pengawasan yang memadai, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan meningkat dan dugaan terhadap korupsi atau penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan.

Kinerja keuangan daerah dapat dievaluasi melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan oleh BPK. LKPD adalah dokumen penting yang mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Penyusunan LKPD bertujuan untuk mendukung upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK melakukan audit terhadap LKPD untuk memberikan opini terkait kewajaran laporan tersebut berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun dan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diserahkan untuk dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian ini didasarkan pada audit laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Hasil penilaian tersebut berupa opini yang disertai catatan-catatan relevan. BPK mengeluarkan empat jenis opini, yaitu Opini Tidak Menyatakan Pendapat

(TMP), Opini Tidak Wajar (TW), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD, hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah telah memenuhi standar yang baik, wajar, dan berkualitas.

Adapun LKPD yang memperoleh opini WTP mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan baik dan bebas dari kesalahan material. Sedangkan untuk LKPD yang mendapatkan opini WDP memiliki arti terdapat beberapa kekurangan dalam laporan, tetapi tidak mempengaruhi keseluruhan kewajaran. Opini TW memiliki arti bahwa laporan terdapat kesalahan material yang signifikan. Dan yang terakhir opini TMP dapat diartikan bahwa BPK tidak bisa memberikan opini karena laporan keuangan sangat buruk (Peraturan BPK Nomor 1, 2017).

Kabupaten Cirebon, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, telah menjadikan prinsip “Good Governance” sebagai pedoman utama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Prinsip ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif pemerintah daerah untuk membuka akses informasi kepada publik serta memastikan bahwa pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pelaporan keuangan dilakukan secara transparan. Komitmen Kabupaten Cirebon terhadap peningkatan transparansi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Fenomena yang dapat diamati saat ini di Kabupaten Cirebon terlihat dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kabupaten Cirebon berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut selama sembilan kali, mulai dari tahun anggaran 2015 hingga 2023. Berikut adalah daftar opini yang diberikan oleh BPK Jawa Barat terhadap LKPD Kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2015-2024.

Tabel 1. 1 Capaian Opini LHP LKPD Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat

No.	Entitas Pemda	Tahun Anggaran										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Provinsi Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WDP	WTP	WTP								
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
6	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cianjur	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Karawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
13	Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP

15	Kab. Purwakarta	WTP										
16	Kab. Subang	TMP	WDP	WDP	WTP							
17	Kab. Sukabumi	WTP										
18	Kab. Sumedang	WTP										
19	Kab. Tasikmalaya	WTP										
20	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
21	Kota Banjar	WTP										
22	Kota Bekasi	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP						
23	Kota Bogor	WDP	WTP									
24	Kota Cimahi	WTP										
25	Kota Cirebon	WDP	WTP									
26	Kota Depok	WTP										
27	Kota Sukabumi	WTP										
28	Kota Tasikmalaya	WDP	WTP									

Sumber : <https://jabar.bpk.go.id/>

Pada tahun 2022, tercatat bahwa sebanyak 13 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), atau sekitar 47%, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil audit yang dilakukan oleh BPK. Selain itu, 5 LKPD yang mewakili sekitar 18%, menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sementara 10 LKPD lainnya atau sekitar 35%, mendapatkan opini WTP dengan Paragraf Penekanan suatu hal. Secara keseluruhan, terdapat 28 entitas pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat (“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK,” 2022).

Dari 47% entitas yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kabupaten Cirebon termasuk di antaranya prestasi ini menunjukkan kinerja yang konsisten, kolaborasi yang solid di antara seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut menghasilkan laporan keuangan yang objektif, wajar, akuntabel dan transparan sehingga Kabupaten Cirebon layak menerima pengakuan ini (Diskominfo, 2024).

Tabel 1. 2 Hasil LKPD Kabupaten Cirebon TA 2019-2024

Tahun Anggaran	Opini BPK
2019	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2024	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : (“Pembkab Cirebon Raih Opini WTP Ke-10 Kali Berturut-Turut,” n.d.).

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Cirebon menunjukkan performa yang baik dan konsisten. Namun, meskipun telah memperoleh opini WTP, ini tidak menjamin bahwa tidak ada masalah yang ditemukan. Setidaknya masih ada beberapa catatan yang diterima dan perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dari pemerintah

daerah Kabupaten Cirebon. Sebagai contoh, pada opini WTP tahun 2020, BPK mencatat adanya kekurangan dalam sistem pengendalian internal dalam penyusunan dan menghasilkan laporan keuangan itu sendiri, termasuk penatausahaan aset tetap yang belum memadai (BPK RI, 2021).

Pengendalian internal di Pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai kelemahan yang dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan yang dikeluarkan pada 20 Mei 2022 dengan Nomor 21B/S-HP/XVIII.BDG/05/2022 yang di mana terdapat kesalahan dalam penganggaran belanja pegawai RSUD Arjawinangun sebesar Rp54.351.820.209,00., terjadi pengurangan volume pekerjaan dari yang ditetapkan dalam kontrak, penilaian persediaan yang belum sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku, dan penyelenggaraan aset tetap yang belum maksimal pada pemerintah Kabupaten Cirebon (“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK,” 2022).

Meskipun Kabupaten Cirebon telah mendapatkan opini yang baik dalam pelaporan keuangan, nyatanya masih ada permasalahan transparansi di Kabupaten Cirebon, seperti terdapat kendala dalam aksesibilitas data publik. Banyak masyarakat yang merasa sulit mendapatkan informasi terkait pengelolaan anggaran daerah, proyek pembangunan, dan keputusan penting lainnya. Situs web pemerintah daerah terkadang tidak diperbarui secara konsisten, sehingga informasi yang tersedia kurang relevan atau sudah kadaluwarsa.

Selain itu, salah satu permasalahan transparansi lainnya yang sering terjadi adalah dugaan penyalahgunaan anggaran. Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau LSM kadang menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan daerah. Ketidakjelasan dalam pengelolaan dana publik sering menimbulkan dugaan korupsi atau penyimpangan dalam alokasi anggaran.

Berdasarkan beberapa studi sebelumnya yang berjudul Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah, ditemukan bahwa penyajian laporan keuangan yang berkualitas, aksesibilitas yang lebih baik, serta sistem pengendalian internal yang efisien memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan transparansi keuangan di pemerintah daerah (Setiawan, B., & Nugroho, 2022).

Menurut (Yuliani, E., & Santoso, 2023) aksesibilitas informasi yang tinggi dan pengendalian internal yang baik berkontribusi pada transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan pengendalian internal tidak memiliki dampak signifikan terhadap transparansi. Hal ini disebabkan oleh adanya regulasi dan implementasi yang tidak konsisten, yang dianggap sebagai faktor yang lebih berpengaruh (Sari, I., & Pramono, 2021).

Melihat fenomena dan celah penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, topik ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan kajian dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas, dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan maka, dapat diklasifikasikan beberapa permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat.
2. Adanya kekurangan pada sistem pengendalian internal dalam penyusunan dan menghasilkan laporan keuangan
3. Masyarakat tidak dapat mengakses informasi terkait pengelolaan anggaran daerah, proyek pembangunan, dan keputusan penting lainnya dikarenakan web pemerintah yang tidak diperbaharui secara konsisten.

4. Adanya pokok-pokok kelemahan dalam pengendalian internal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
5. Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam laporan keuangan daerah.
6. Adanya ketidakjelasan dalam pengelolaan dana publik sering menimbulkan dugaan korupsi atau penyimpangan dalam alokasi anggaran.
7. Aksesibilitas terhadap laporan keuangan yang rendah serta kelemahan dalam sistem pengendalian internal dapat menurunkan tingkat transparansi.

C. BATASAN MASALAH

Sebagai bahan pertimbangan karena terdapat keterbatasan waktu dan data yang diperoleh serta agar membantu arah penelitian yang terfokus, maka dalam penelitian ini hanya akan membahas beberapa variabel saja. Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, terutama yang berkaitan dengan transparansi laporan keuangan daerah. Penelitian ini membatasi analisis pada tiga faktor utama yang mempengaruhi transparansi, yakni penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi laporan keuangan di Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi laporan keuangan di Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon?

3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal dalam terhadap transparansi laporan keuangan di Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon?
4. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal secara simultan terhadap transparansi laporan keuangan di Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi laporan keuangan di instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Untuk menganalisis pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan di instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal dalam mempengaruhi transparansi laporan keuangan di instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan di Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

F. MANFAAT PENELITIAN

Sehubungan dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Pada penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan literatur dan pengetahuan di bidang akuntansi dan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal transparansi laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengetahui atau meneliti lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintahan daerah.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini memberi penulis wawasan lebih jauh mengenai dampak pelaporan keuangan, aksesibilitas pelaporan keuangan dan analisis pengendalian internal tentang transparansi pelaporan keuangan. Penulis juga mendapatkan pengalaman dalam proses penelitian empiris, yang bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi dan keuangan pemerintah.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon

Penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menganalisis dan memperbaiki sistem penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal. Temuan penelitian ini menjadi acuan perbaikan sistem keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas tata kelola keuangan di Kabupaten Cirebon.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Menulis secara sistematis bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bagian dalam penelitian tersusun secara runtut dan logis, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan dan memahami inti dari penelitian. Sistematika berikut yang digunakan dalam penelitian:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran umum tentang kerangka dasar penelitian yang berisi fenomena, permasalahan, urgensi, tujuan, manfaat dan batasan yang ada dalam penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini, menyajikan tinjauan pustaka dan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian. Penulis juga mengembangkan kerangka teori, hipotesis, dan model penelitian berdasarkan peneliti terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini mempresentasikan metodologi penelitian, mencakup pengumpulan data, analisis data, objek penelitian, sampel, populasi dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data, pembahasan, pengujian hipotesis dan interpretasi hasil penelitian. Hasil penelitian mencakup data, pembahasan dan pengujian hipotesis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir hasil penelitian, keterbatasan dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.